

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- A., Dhoho, dkk. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Jakarta.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. SinarGrafika. Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metodelogi Penelitian Hukum*. RinekaCipta. Jakarta.
- Badudu dan Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Budiharjo, Miriam. 2004. *Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Gramedia. Jakarta.
- Mihradi, R.M. 2011. *Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara. Ghalia Indonesia*. Jakarta.
- Santosa dan Pandji. 2008. *Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama. Bandung.
- Sinambela, L.P. dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mammudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemitro, R.H.. 1994. *Metodelogi Penulisan dan Jurumetr*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sunggono,Bambang. 1994.*Hukum dan Kebijakan Publik*.Sinar Grafika. Jakarta
- Sutedi, Sanstosa. 2009. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245)

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No 1)

### **SKRIPSI:**

Agung,Wicaksono. 2009. *“Implementasi Pelayanan Publik oleh Dinas Perizinan kabupaten Bantul dalam Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Kembaren, T.U.. 2013. *“Peranan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam Menerapkan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terkait Pemberian Izin Usaha dalam Upada Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Mewujudkan Asas Transparasi”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Wahy, I.A.. 2010. *“Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Perwujudan Pemerintahan yang Baik (Tinjauan Yuridis Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**SITUS INTERNET:**

<http://perizinan.jogjakota.go.id/home.php?mode=content&id=181>, diakses pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 20.00 WIB